

BAB IV

UPAYA ANTI-SLAVERY DALAM MENDORONG PEMERINTAH INDIA MERATIFIKASI DUA KONVENSI MENGENAI CHILD LABOUR DI INTERNATIONAL CHILD LABOUR CONVENTIONS

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai upaya apa saja yang dilakukan oleh NGO Anti-Slavery Internasional dalam menangani kasus eksploitasi pekerja anak yang terjadi di India pada tahun 2012-2017. Diantara usaha yang dilakukan oleh Anti-Slavery adalah advokasi terhadap masyarakat dan pemerintah India melalui program-program yang diusung oleh Anti-Slavery mengenai kasus eksploitasi pekerja anak, dengan memiliki tujuan bahwa anak-anak yang dipekerjakan dapat kembali ke bangku sekolah sehingga mereka mendapatkan pendidikan yang layak untuk kemudian dapat memajukan bangsa dan negaranya. Dan juga diharapkan program-program yang diusung oleh Anti-Slavery dapat setidaknya menurunkan angka pekerja anak dari tahun ke tahun.

A. Penyebaran Informasi Eksploitasi Pekerja Anak Melalui Laporan Kasus Brick Kiln Di Website Anti-Slavery

Permasalahan pekerja anak di India telah menjadi permasalahan besar dari tahun ke tahun, anak-anak di India yang berumur sekitar 5 hingga 14 tahun terpaksa harus bekerja 12 jam sehari dan meninggalkan sekolah mereka karena permasalahan ekonomi keluarga mereka yang sudah dipaparkan di BAB II, anak-anak ini terpaksa untuk membantu ekonomi keluarga dan menghidupi diri sendiri, karena tak jarang dari para pekerja anak ini yang orang tuanya terlilit hutang sehingga mereka harus mencari uang untuk biaya keluarga. Tindakan pelanggaran terhadap hak

asasi manusia ini hampir terjadi di seluruh daerah miskin di India. Bahkan tak jarang sebagian besar dari para pekerja anak ini tidak mendapatkan pendidikan yang layak sama sekali. Sebagian besar anak-anak ini bekerja dalam beberapa sector yaitu sector pertanian, sector industry, dan sector pelayanan.

Anti-Slavery sebagai organisasi Hak Asasi Manusia yang tertua di dunia sejatinya harus memiliki peran dan andil yang besar dalam penanganan kasus pekerja anak di India. Anti-Slavery dan mitra-mitra lokalnya memiliki beberapa program yang memang tujuannya untuk menangani masalah eksploitasi pekerja anak di India dan ketika eksploitasi anak sudah dalam kasus yang parah, hal ini dinamakan perbudakan anak.

Dalam penelitian ini, seperti yang sudah penulis paparkan sebelumnya dalam BAB I sub bab Landasan Teori, penelitian ini menggunakan Konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN). Menurut Margaret dan Kathryn Sikkink dalam bukunya yang berjudul *Transnational Advocacy Networks In International And Regional Politics* dijelaskan bahwa terdapat 4 upaya suatu Jaringan Advokasi untuk melakukan advokasi yaitu *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politic* dan *Accountability Politics*. Dalam sub bab ini akan penulis jabarkan tiga dari 4 upaya dari Anti-Slavery dalam mencapai tujuannya. Tiga dari upaya tersebut adalah yaitu *Information Politics*, *Leverage Politic* dan *Accountability Politics*.

Sesuai dengan pengertian dari Margaret dan Kathryn, *Information Politics* yaitu upaya yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyediakan informasi bagi masyarakat serta membeberkan fakta melalui pernyataan-pernyataan dari para korban dan sebagainya hingga menarik perhatian masyarakat yang kemudian mampu menggerakkan

masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap isu yang diperjuangkan. (Keck & Sikkink, 1999)

Anti-Slavery seperti yang diketahui dan sudah diakui merupakan suatu NGO yang sudah berdiri puluhan tahun dan sudah memiliki jaringan di seluruh dunia. Anti-Slavery memiliki misi untuk menghapuskan segala bentuk perbudakan yang ada di dunia. Anti-Slavery memilih untuk menangani akar penyebab kebudakan dan konsekuensi dari perbudakan tersebut untuk nantinya bisa mencapai perubahan yang berkelanjutan. Anti-Slavery mengadakan project untuk membantu anak-anak yang terjatuh dalam kasus perbudakan di 10 negara. Salah satunya adalah di negara India. Di India, dimana seluruh keluarga terjebak dalam jeratan hutang oleh pemilik tempat pembakaran batu bata, dimana pemilik ini menolak untuk membayar mereka. Anti-Slavery membantu para pekerja ini dapat mengklaim gaji mereka, meninggalkan tempat pembakaran batu bata, dan memastikan anak-anak yang terjatuh dalam kasus ini untuk dapat pergi ke sekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak.

Pada bulan Agustus tahun 2012, Anti-Slavery mengadakan project untuk pemberdayaan untuk Para Pekerja Terikat di Industri Tempat Pembuatan Batu Bata di tiga negara bagian di India, yaitu di Punjab, Haryana, dan Chandigar. Project ini mendukung para Pekerja Terikat ini untuk mendapatkan hak mereka yaitu mendapatkan dukungan dari negara. Proyek ini bekerja sama dengan Pemilik tempat pembuatan batu bata dan pihak yang berwenang untuk membuat pabrik ini diawasi oleh Undang-Undang Pabrik inia bernama Factory Act India dimana undang-undang ini yang menentukan upah minimum yang harus didapatkan oleh para pekerja dan undang-undang ini juga melarang pekerja anak. Anti-Slavery juga membantu

para pekerja ini untuk membuat asosiasi/kumpulan bagi para pekerja yang bekerja di tempat pembakaran batu bata. (Anti-Slavery, 2012)

Ada banyak sekali tempat pembakaran batu bata di seluruh bagian di negara India. Punjab memiliki sekitar 3000 tempat pembakaran batu bata walaupun Punjab adalah negara bagian yang kecil. Industri tempat pembakaran batu bata di India dan di negara lain sama saja, Industri ini memperkerjakan sekitar 200 pekerja. Anti-Slavery bermaksud untuk memberi manfaat lebih banyak kepada para pekerjanya.

Pada tahun 2013, Ini adalah tahun pertama bagi Anti-Slavery dalam menjalankan proyeknya di Tempat Pembakaran Batu Bata di India dalam membebaskan para pekerja ini dari jeratan hutang. Para Pekerja ini mencakup di 50 tempat pembuatan batu bata dan dibagi menjadi tiga distrik di Punjab. Anti-Slavery melakukan survey kebutuhan para pekerja ini untuk mendapatkan haknya dari pemerintah seperti pendidikan untuk anak-anak. Anti-Slavery membentuk sebuah asosiasi pekerja dan keanggotaan dari asosiasi ini telah berkembang pesat. Para mitra local dari Anti-Slavery memulai diskusi dengan Asosiasi Pemilik Tempat Pembakaran batu bata untuk meningkatkan kondisi pekerjaan di tempat itu. 15 dari pemilik tempat pembakaran batu bata berkomitmen untuk memasang keran air minum yang aman dan memulai provident fund scheme untuk para pekerjanya. Pada bulan Mei 2013, Mitra Anti-Slavery yang berada di Delhi dan Punjab mengadakan pelatihan pekerja bagi pria dan wanita tentang ketentuan hak pemerintah, kondisi tempat kerja di kiln dan dukungan hukum yang harus didapatkan para pekerja ketika mereka berada dalam bentuk perbudakan yang ekstrim. Proyek ini juga mengadakan hotline gratis bagi para pekerja untuk dapat menghubungi

pihak berwajib untuk melaporkan pelanggaran dan mencari dukungan sementara. Dan sebuah pusat rehabilitasi sementara telah didirikan di Punjab untuk para pekerja yang melarikan diri dari kekerasan dan pelanggaran hak asasi mereka. (Anti-Slavery, 2013)

Pada tahun yang sama juga, mitra local Anti-Slavery mengadakan pertemuan dengan para pekerja yang bekerja di tempat pembakaran batu bata, dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran para pekerja tentang masalah-masalah seperti pekerja terikat, dan hak hak hukum mereka. Tujuan dari pertemuan ini juga untuk membina para pekerja untuk membuat organisasi para buruh atau serikat para buruh sehingga mereka dapat dengan mudah untuk beraspirasi ketika mereka dalam masalah.

Pertemuan ini diadakan di dalam Kuil Ram Tirath di dekat daerah Amritsar. Pada saat itu, para pekerja yang hadir ada sekitar 1500 orang, melebihi dari ekspektasi sebelumnya. Para pekerja ini berasal dari distrik Amritsar, Taran Tarnm dan Ferozpour. Sebelumnya, Anti-Slavery dan mitra lokalnya VSJ hanya mengharapkan pekerja yang hadir hanya 500 hingga 1000. Pidato dibuat oleh berbagai staf dan sukarelawan VSJ, pidato ini berisi pernyataan mengenai kesulitan yang dihadapi oleh para pekerja, namun juga memberi solusi bagaimana caranya agar masalah-masalahnya bisa diatasi. Inti dari pertemuan tersebut adalah agar para pekerja dapat bisa berkumpul bersama-sama saling bahu-membahu mengenai masalah yang mereka hadapi sehingga mereka bisa saling menguatkan dan mencoba mencari solusi dari permasalahan tersebut. Dan diakhir pertemuan, Hira Singh salah satu dari staf VSJ menyanyikan beberapa lagu mengenai kehidupan tentang pekerja terikat yang bekerja di tempat pembakaran batu bata. Informasi-informasi yang disampaikan di pidato berasal dari perwakilan dari para

pekerja di tempat pembakaran batu bata dari berbagai distrik, dan para perwakilan ini diminta sekalian untuk menjadi ketua perwakilan dari distrik mereka. Dengan demikian, lima puluh dari pekerja dari tempat pembakaran batu bata di ketiga distrik ini kini telah diminta untuk memimpin dan mewakili aspirasi para pekerja di tingkat local. Meskipun ini adalah langkah kecil dalam proses panjang untuk menciptakan persatuan dari para pekerja ini, hal ini mengembirakan bagi Anti-Slavery dan mitra lokalnya, VSJ melihat begitu banyak antusiasme dari para pekerja tentang ide tersebut. (Justice, 2013) meskipun setelah acara ini berakhir, dan para pekerja tempat pembuatan batu bata kembali ke tempat mereka, beberapa pekerja menghadapi penganiayaan dari para majikan mereka. Para pengusaha pemilik tempat pembuatan batu bata ini khawatir tentang implikasi dari para pekerja yang sudah menyadari hak-hak mereka. Namun VSJ tetap memantau situasi dan memberikan dukungan.

Pada tahun 2014, Anti-Slavery melanjutkan proyeknya untuk memberdayakan para pekerja terikat. Setelah bekerja di 50 tempat pembakaran batu bata di India, Anti-Slavery mengekspansi pekerjaannya menjadi 100 tempat pembakaran batu bata. Keanggotaan asosiasi pekerja telah meningkat pesat. Anggota dididik melalui materi peningkatan kesadaran yang ditargetkan seperti kartu pos yang memberikan informasi penting tentang hak-hak pekerja dan dukungan yang tersedia di dekat tempat kerja mereka. (Anti-Slavery, 2014)

Sebagai hasil dari pekerjaan penjangkauan ini dan panggilan ke hotline gratis yang dibuat oleh proyek dari Anti-Slavery, 1.005 petisi diajukan atas nama 4.600 orang ke Komisi Hak Asasi Manusia Nasional (NHRC) yang meminta tindakan yang tepat terhadap penyelidikan atas pelanggaran

terhadap para pekerja, dan meminta untuk pembebasan mereka dari perbudakan. Keluarga-keluarga yang mengalami permasalahan perbudakan yang parah telah didukung untuk membawa kasus mereka ke Hakim Daerah. Anti-Slavery juga menjangkau para pemilik kiln untuk terus berkomitmen dalam meningkatkan kondisi di tempat pembakaran batu bata itu, dan para pemilik kiln yang berkomitmen terus bertambah. Mitra Anti-Slavery juga bekerja dengan pejabat dan pemerintah setempat dalam penerapan undang-undang dan kebijakan untuk meningkatkan kondisi kerja di tempat pembakaran batu bata ini.

Hasilnya, para pekerja diundang untuk mendaftar untuk kartu jatah hak negara, yang mendukung keluarga untuk membeli makanan dan pasokan dasar, yang pada gilirannya mengurangi ketergantungan mereka pada pinjaman yang diambil dari majikan mereka. Demikian pula, anak-anak pekerja dibebaskan dari biaya sekolah dan mendapatkan akses ke sekolah.

Anti-Slavery juga memperluas proyeknya selama musim libur ke daerah sumber dari mana para pekerja migran berangkat untuk bekerja di kiln untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka, mendukung mereka untuk mengakses hak-hak negara dan memfasilitasi migrasi yang aman.

Pada tahun 2014 hingga 2015, Anti-Slavery dengan mitra lokalnya di India, Volunteers for Social Justice (VSJ) untuk daerah Punjab. Centre for Education and Communication (CEC) di daerah Delhi dan Jan Jagriti Kendra (JIK) di Chhattisgarh bekerja untuk meningkatkan kondisi kerja di Kiln dengan melibatkan para pemilik dan pemberdayaan pekerja untuk memfasilitasi akses hak pekerja ke pemerintah, serta dengan melobi pemerintah

daerah dan nasional untuk melindungi pekerja migran dari tenaga kerja terikat. Peningkatan kesadaran dan dukungan berlanjut di Kiln dan tahun 2014, lebih dari 45.000 pekerja telah menghadiri lebih dari 900 sesi yang diselenggarakan VSJ mengenai hak-hak pekerja dan akses ke hak-hak pemerintah, dengan VSJ membantu lebih dari 5.000 pekerja untuk mendaftar. (Anti-Slavery, 2014)

Pada tahun 2015, Anti-Slavery dan para mitra lokalnya menyerukan tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah India untuk mengatasi Pekerja yang terikat baik itu orang dewasa maupun anak-anak yang bekerja di tempat pembakaran batu bata dan memastikan pemerintah untuk memenuhi konvensi ILO no.29 mengenai Forced Labour dan konvensi ILO lainnya.

Sektor tempat pembuatan batu bata ini sangat rentan terhadap kerja paksa dan kerja yang terikat. Upah yang sangat rendah, eksploitasi yang meluas, penggunaan uang muka dan uang pinjaman dalam jumlah besar untuk mengendalikan para pekerja, serta masyarakat yang dikucilkan secara social dan secara ekonomi terpinggirkan bisa terjadi di tempat ini. Hal ini berasal dari kegagalan pemerintah untuk menerapkan undang-undang yang relevan dan menuntut para pelanggar hukum dan kurangnya tindakan berkelanjutan yang menargetkan akar penyebab dari masalah pekerja terikat dan lingkungan dimana para pekerja mengalami ancaman dan kekerasan ketika berusaha untuk berorganisasi dan bertindak secara kolektif. Diambil dari catatan pekerjaan para mitra Anti-Slavery yang bertugas di daerah Punjab dan Chattisgarh, Anti-Slavery telah menyiapkan makalah pengarahan yang tantangan yang terus dihadapi oleh para pekerja kiln bata dan rekomendasi untuk mengatasi hal ini dan memastikan hak-hak pekerja sesuai

dengan hukum internasional dan nasional. (Willingham, 2015)

Pada tahun 2016, bersama dengan mitra lokalnya, Anti-Slavery membantu para pekerja di Kiln mengakses keadilan, mendapatkan kompensasi, memperbaiki kondisi kerja dan mendukung mereka untuk berkumpul sebagai kelompok untuk mengadvokasi hak-hak mereka. Anti-Slavery juga bekerja untuk memastikan anak-anak dapat pergi ke sekolah dan memiliki akses perawatan kesehatan. Anti-Slavery juga memfokuskan penelitian mereka kepada perempuan yang juga menjadi pekerja. Anti-Slavery lalu menyelenggarakan konvensi nasional pertama untuk pekerja perempuan di bulan April 2016. Highlight dari tahun ini adalah Anti-Slavery dapat memperoleh pembebasan dari sertifikat perbudakan bagi pekerja dalam jumlah besar, meskipun negara bagian Punjab masih belum mengakui bahwa pekerja terikat ada di negara bagian itu. (Anti-Slavery, 2016)

Upaya-Upaya yang Anti-Slavery lakukan dalam memberantas eksploitasi Pekerja Anak di India tidak hanya terjun langsung ke tempat kejadian perkara, namun Anti-Slavery melakukan sejumlah kampanye internasional yang mengangkat isu Child Slavery. Kasus Eksploitasi pekerja anak ini adalah termasuk bagian dari perbudakan anak, karena di dalam kasus eksploitasi pekerja anak, anak-anak dari umur 5 hingga 14 tahun dipaksa bekerja dan terpaksa tidak sekolah. Anak-anak ini bekerja untuk membantu melunasi hutang keluarganya.

B. Upaya Anti-Slavery Untuk Mendapatkan Perhatian Dari Para Actor Yang Memiliki Kekuatan

Pada tahun 2014, Direktur dari Anti-Slavery, Aidan Mcquade menghadiri konferensi perburuhan

internasional yang ke 103 di Geneva. Dalam pidatonya, Aidan mengatakan kepada para delegasi yang hadir untuk mendesak para pemerintah untuk membuat peraturan yang pasti untuk menangani kasus kerja paksa di seluruh dunia. Ini adalah kesempatan Anti-Slavery untuk mendorong pemerintah di seluruh dunia untuk lebih memperhatikan lagi isu kerja paksa dan perbudakan ini.

Aidan MCQuade mengatakan dalam pidatonya
“We therefore appeal to this Conference to seek a binding Protocol with a strong Recommendation to the Convention that will require states to ensure law and practice that effectively identifies and protects victims of forced labour, giving special consideration to the particular risks faced by migrants, women and children and to ensure that the perpetrators of forced labour compensate their victims; that require states ensure their courts and law enforcement have sufficient capacity to ensure effective rule of law against forced labour so that states create a level playing field for ethical business, declaring also their expectations of business action to eradicate forced labour from their supply chains and how businesses should disclose their efforts towards these ends; that requires states and employers to promote freedom of association and collective bargaining for all workers; and that encourages states to incorporate into their aid, trade and diplomacy measures to reduce the risk of forced labour.” (Anti-Slavery, 2014)

Pada tahun 2015, Anti-Slavery mengatakan di situs resminya bawah Anti-Slavery mengajak para mitra internasionalnya untuk menyerukan tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah India untuk mengatasi permasalahan pekerja terikat baik itu adalah pekerja dewasa dan anak-anak di sector tempat pembuatan batu bata dan memastikan bahwa Pemerintah India mengimpelentasikan konvensi ILO no.29 mengenai Forced Labour dan konvensi ILO yang lainnya.

Para pekerja di tempat pembuatan batu bata ini sangat rentan dengan isu kerja paksa dan menjadi pekerja terikat. Penggunaan uang muka dan pinjaman dalam jumlah besar untuk mengamankan dan mengendalikan para pekerja agar tetap dalam siklus hutang yang berkepanjangan. Para pekerja migran juga dikucilkan secara social dan secara ekonomi terpinggirkan. Praktik perekrutan yang eksploitatif, bahkan pemberian upah yang sangat rendah semua bisa terjadi di tempat ini.

Menurut Anti-Slavery, hal ini terjadi karena kegagalan oleh Pemerintah untuk menerapkan undang-undang yang relevan untuk menuntut para pelanggar hukum dan kurangnya tindakan berkelanjutan untuk mengatasi akar dari permasalahan ini. Dimana para pekerja mengalami ancaman dan kekerasan ketika merek berusaha untuk berorganisasi dan bertindak secara kolektif.

Anti-Slavery menyiapkan makalah pengarahan yang isinya uraian mengenai tantangan yang terus dihadapi oleh para pekerja di tempat pembakaran batu bata dan rekomendasi untuk mengatasi hal ini dan memastikan hak-hak para pekerja dipenuhi oleh pemerintah India sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

Pada tanggal 13 Juni 2017, Pemerintah India menyerahkan instrument kepada International Labour Organization untuk meratifikasi 2 konvensi fundamental dari ILO mengenai pekerja anak. Yang pertama adalah Minimum Age Convention (no.138) dan The Worst Forms of Child Labour Convention (no.182).

India adalah negara anggota ILO ke 170 yang meratifikasi konvensi no.138 yang mengharuskan negara untuk menetapkan usia minimum dimana tidak seorang pun anak di bawah umur yang boleh diterima bekerja atau bekerja dalam pekerjaan apapun kecuali untuk pekerjaan ringan dan pertunjukkan artistik.

Selain itu, India adalah negara anggota ILO ke 181 yang meratifikasi konvensi no.182 yang menyerukan larangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk perbudakan, kerja paksa, dan perdagangan anak-anak seperti penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata, penggunaan anak-anak untuk pelacuran, untuk pornografi, dan dalam kegiatan-kegiatan terlarang seperti perdagangan narkoba dan pekerjaan-pekerjaan berbahaya lainnya.